

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengacu pada faktor-faktor kendala yang terjadi setiap tahunnya dengan menerapkan *Theory Of Constraint* (TOC) oleh (Hansen & Mowen, 2007).

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Unit Organisasi TNI Angkatan Laut mulai dari perencanaan, Saiba dan Simak BMN Sebagian besar (85 persen) *personel* merangkap tanggungjawabnya hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya tingginya selisih TK/TM, selain itu operator Saiba dan Simak BMN ada yang belum menguasai aplikasi yang diwajibkan oleh Kementerian Keuangan dalam pengelolaan data sumber Laporan Keuangan selain itu tidak hanya operator yang kurang memahami aturan pengelolaan keuangan negara seperti aturan Hibah dan akuntansi pemerintah seperti jurnal balik karena sudah adanya terbayarkannya hutang piutang yang mengakibatkan data yang kurang valid.
2. Masih ditemukannya akun belanja yang tidak terregister hal ini karena adanya kesalahan input oleh operator Saiba maupun Simak BMN selain itu ada karena pembelanjaan akun yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan karena adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, sudah diketahui belanja barang memiliki perbedaan nilai pagu terendah yang berbeda dengan belanja modal dan akun barang dibelanjakan menjadi persediaan hal ini juga mengakibatkan data tidak terregister oleh aplikasi Simak BMN.
3. Kurangnya memahami aturan keuangan negara seperti akuntansi keuangan negara yaitu aturan hibah, jurnal balik untuk perubahan

hutang piutang yang mengalami perubahan karena adanya pembayaran, selain itu kurangnya menguasai aplikasi Saiba dan Simak BMN oleh operator yang melaksanakan penginputan data sumber yang nantinya akan menjadi laporan keuangan Unit Organisasi TNI Angkatan Laut.

4. Aplikasi Saiba dan Simak BMN masih belum optimal dalam pengelolaan perlu banyak perbaikan dan sinkronisasi baik itu mengenai ada satker baru yang belum diakui dalam aplikasi juga ada akun yang belum dapat diinputkan dalam aplikasi hal ini yang menjadikan kesulitan yang berdampak langsung dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan informasi belum optimal dalam mendukung penyusunan laporan keuangan.

2. Hasil dari penerapan *Theory of Constraint* diharapkan akan mengurangi hambatan /kendala yang selama ini dhadapi dan mengurangi selisih pada satker TK/TM sehingga penyusunan laporan keuangan lebih efisien dan tepat waktu untuk peserta kursus utamakan bagi pengelolaan keuangan tidak hanya yang berkedudukan di bagian keuangan namun yang terlibat langsung pada data sumber, untuk pencocokan data barang di tingkat wilayah sebaiknya didudukan dalam satu lokasi diwilayah anggaran sehingga saat diadakan rekonsiliasi data akan lebih efektif dan efisien, diperlukan komitmen yang tinggi dalam hal pembelanjaan agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan lebih ditingkatkan perencanaan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan organisasi.

## **5.2. Saran**

1. Solusi dalam penyelesaian hambatan yang terkait dengan adanya perubahan kebijakan aplikasi dengan melakukan pengecekan data yang memerlukan waktu lebih ekstra dengancara bekerja overtime.

2. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi internal antara Saiba dan Simak BMN untuk kesesuaian data, koordinasi dengan satker BMN untuk penyelesaian TK/TM menginventarisir pencatatan Hibah yang diterima, menginventarisir hutang piutang rumah sakit yang sudah terbayar untuk dilaksanakan jurnal balik serta memperbaiki saldo perolehan dan nilai buku minus.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Tafriji Biswan dan Darhasani. (2018). Studi Terapan Theory Of Contraint Layanan Pemeberitahuan SuratT Paksa pada KPP Pratama Natar. *Substansi,,* 1-23.
- Alicia, A. (2009). *Analisis Atas Manajemen Aset Tetap Dan Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Pada Rumah Sakit Berstatus BLU: Studi Kasus Pada RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo*. Jakarta: Perpustakaan Universitas Indonesia.
- Amrizal. (2021). *Antecedents and Consequences of Successful Implementation of Accrual Base Government Accounting System in Central Government*. *International Journal of Research - Granthaalayah*, 146-172.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggraeni, D. P. (2018). Pendeteksian Fraud Pada Tata Kelola Penatausahaan Persediaan Badan Layanan Umum. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 168-176.
- Arisnawati, N. F. (2019). *The Implementation of SAK ETAP to The Financial Report of SMEs*. *e-Journal Al-Buhuts*, 21-31.
- Azman, T. (2015). Analisis Komitmen Organisasi Kesiapan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Serta Sistem Informasi Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aakrual (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Sorot*, 1-142.
- he Effects of Local Government Characteristics and Audit Opinion on the Performance of District and City Governments in Indonesia*
- Dewata, E. (2018, SEPTEMBER 30). T. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 151-162.
- Dewi, A. R. (2020). Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 761-776.
- Ekowati, N. (2015). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Manajemen Keuangan, FEB Universitas Brawijaya*, 1-7.
- Gusnardi. (2010). Tinjauan Teori TOC. *Jurnal Pekbis* , 336-345.
- Hadi Jauhari, S. H. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 1-18.

- Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartanto. (2019). Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan Metode Ward dan PEPPARD di Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM). *Media Informatika*, 142-150.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hidayat, U., ikhsan, S., Risnaningsih, I., & Pratomo, T. A. (2021). Implementasi Manajemen Aset Tetap pada Koperasi Fungsional dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. *Humatech Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 247-262.
- Inderawan, Y. (2015). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dalam Pengurusan Barang Milik Negara yang Efektif di TNI Angkatan Darat*. Jakarta: Perpustakaan STIA LAN Jakarta.
- Indonesia, I. A. (2002). *Standar Akuntansi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, I. A. (2007). *Standar Akuntansi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irfan, E. N. (2020). The Improving Model of the Quality of Financial Statements and Successful Implementation of Local Financial Information Systems. *International Journal of Business Economics (IJBE)*, 128-144.
- Iskandar Muda, A. H. (2019). Factors of quality of financial report of local government in Indonesia . *Friendly City 4 'From Research to Implementation For Better Sustainability*, 1-7.
- Jakarta, S. L. (2021). *Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta*. Jakarta: STIA LAN Jakarta.
- Joana, T. (2023). ADM Keuangan Negara. *Academia*, 1-14.
- Karsana, I. W. (2017). Pengaruh Efektivitas Penetapan SAP, Kompetensi SDM dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 643-670.
- Kasmir. (2018). *Analisa Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Khotimah, M. F. (2022, Januari). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Keunis (Keuangan dan Bisnis)*, 10, 1-12.
- Kustono, A. S. (2020). Preparing the quality of financial statements at health centers: to explore the role of regional inspectorates and professionalism of accounting personnel. *The Indonesian Accounting Review*, 1-12.

- Kuswandi, s., Banjarmasin, A. R., Surya, C. M., Mardia, Purba, B., Manullang, S. O., . . . Sudarmanto, E. (2021). Manajemen Aset dan Pengadaan. In R. Watrionthos, & J. Simamarta, *Manajemen Aset dan Pengadaan* (pp. 1-166). Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Latifah, B. P. (2013). Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Kimia Analisis Bogor). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 117-128.
- Mahaputra, I. P. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 230-244.
- Maulana, C. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 (Studi Kasus pada Kementerian Perdagangan). *repository.stei*, 1-99.
- Nadia, L. (2021). Pentingnya Sistem Informasi untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah. *AKUNTABEL*, 295-302.
- Nasrudin, E. (2015). Efektifitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) terhadap Pengelolaan Aset Negara. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 1-12.
- Niu, F. A. (2014). Analisis Penerapan PP. NO. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal EMBA*, 714-722.
- Nugraha, H. (2017). Komitmen Menata Aset. *Media Auditor*, 1-82.
- Panggalih, F. H. (2021). *Rancangan penerapan Praktik Terbaik sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- pemerintah, K. S. (2010). *Sistem Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: -.
- Riadi, M. (2022). Teori Kendala (Theory of Constraint) . *KajianPustaka.com*, -.
- Rustan. (2019). Penggunaan Basis Akrua dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Watampone. *Amnersty: Jurnal Riset Perpajakan*, 79-84.
- Samsulrijal, H., Elpisah, Joko, S., Nurwahidah, Abdulah, & Fachrurazi. (2022). *Manajemen Keuangan* (Vol. 1). (Fachrurazi, Ed.) Jawa Tengah: Penerbit CV Pena Persada.

- Sari. (2017). Analisa Rasio Likuiditas Laporan Keuangan Pada Adira Dinamika Multi Finance Tbk. *urnal Akuntansi Dan Keuangan*, 48-55.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance. *The Studies Of Social Science*, 7-21.
- Setiawan, A. (2019). Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, : 265-278.
- Sumarwati, E. D. (2018). Analisis Aparatur Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi (Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo). *Accounting Global Journal*, 15-33.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteja. (2018). Analisis Kinerja Keuangan dengan Metoda Altman Z-Score pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12-17.
- Syuraika, E. (2018). Penerapan Theory Of Constraint (TOC) untuk Meningkatkan Profitabilitas pada Perusahaan Bakpia Latief di Kota Kediri. *Cendekia Akuntansi*, 1-9.
- Taufik, A. (2020). Rencana Strategis Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN. *Renstra Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 2020-2024*, 1-32.
- Tulungen, E. e. (2014). Analisis Faktor-faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisis Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 71-86.
- Tutu, A. (2022). Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 175-182.
- Wastam, W. H. (2018). Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan. In W. H. Wastam, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (pp. 1-69). Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Wicaksana, A. (2021). Pengaruh Inventarisasi Aset, Pengguna Aset, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah melalui Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1-14.
- Wijayati, D. T. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Strategik pada Organisasi Non Profit (Studi Manajemen Strategik pada Dinas Propinsi Jawa Timur). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24-32.

Winarni, A. (2018). Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Menggunakan Framework Cobit 5(tudi Kasus : di Fasharkan TNI AL Mentigi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 81-87.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan yang berkaitan dengan Analisis Penyusunan Laporan Keuangan TNI Angkatan Laut Pada Subdis Akuntansi Pelaporan Keuangan Dinas Keuangan Angkatan Laut

1. Bagaimana pembagian tugas untuk para petugas Simak BMN dan Saiba disetiap tingkat unit akuntansi? Apakah ada perbedaan?
2. Bagaimana penunjukan tugas tersebut dalam dinas sehari-hari, apakah sesuai dengan jabatan definitif?
3. Apakah petugas Saiba dan SIMAK BMN sudah ditetapkan dengan jelas sesuai dengan organisasi satuan, kapan penetapan tersebut dan bagaimana penunjukannya?
4. Apakah ada persyaratan Pendidikan untuk para petugas operator Saiba dan operator Simak BMN?
5. Bagaimana penyusunan Laporan Keuangan unit organisasi Angkatan Laut dari tahun 2017 sampai dengan 2020?
6. Apakah semua aturan/regulasi tentang Saiba dan Simak BMN sudah diketahui oleh para petugas?
7. Bagaimana dengan aplikasi Saiba dan Simak BMN?
8. Kapan penetapan pembentukan satuan organisasi keuangan dan SIMAK BMN berdampingan dan bagaimana penunjukannya?
9. Apakah penyusunan Laporan Keuangan U.O TNI Angkatan Laut sudah berjalan dengan baik?
10. Apakah menurut saudara hambatan-hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?
11. Bagaimanakah menurut saudara penyebab terjadinya hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?
12. Apakah menurut saudara dampak yang terjadi akibat adanya hambatan dalam Menyusun Laporan Keuangan?
13. Mengapa hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut dapat terjadi?
14. Menurut saudara bagaimanakah solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan? dan Bagaimana menurut saudara proses penyusunan Laporan Keuangan yang ideal?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TNI ANGKATAN LAUT PADA SUBDIS  
AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN  
DINAS KEUANGAN ANGKATAN LAUT**

<b>Nama</b>	:	<b>Pandu Briantisno, S.A.P., M. Si. CTMP, CRMP</b>
<b>Pangkat/NRP/NIP</b>	:	<b>Mayor Laut (S) NRP 19253/P</b>
<b>Jabatan</b>	:	<b>Kasubsi Verifikasi</b>
<b>Tanggal Wawancara</b>	:	<b>9 Juni 2022</b>
<b>Waktu Wawancara</b>	:	<b>15.00 Wib</b>
<b>Lokasi Wawancara</b>	:	<b>Ruang Staf Akun Kuwil Mabelsal</b>

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Bagaimana pembagian tugas untuk para petugas Simak BMN dan Saiba disetiap tingkat unit akuntansi? Apakah ada perbedaan?	Untuk pembagian tugas di Saiba jelas untuk petugas BP PPSPM harus memiliki sertifikasi sebelum memangku jabatan tersebut tugas tanggungjawab secara rinci dalam Perkasal kita sebutkan yang terbaru yaitu Perkasal Nomor 29 Tahun 2021 dan Simak BMN di Satker Slog Kasal jelas secara structural dalam Perkasal Nomor 4 Tahun 2016 dan memang tidak ada aturan harus memiliki sertifikasi untuk memangku jabatan coordinator Simak BMN dan otomatis ditunjuk kataud membawahi kaur Simak BMN dibantu Ur Barang Bergerak, Ur Barang tidak Bergerak Ur Pengolah Data dan Ur Penyajian dan Informasi namun untuk disatker yang transaksinya jarang seperti disminpersal, Akun Kuwil Mabelsal, Kuwil Mabelsal dan Sebagian besar satker dibawah eselon -1 petugasnya merangkap sebagai pelaksana 1 sebagai petugas Akuntansi dan pelaksana 2 bertugas sebagai petugas administrasi tidak hanya mengerjakan Saiba juga mengerjakan Simak BMN.
2.	Bagaimana penunjukan tugas tersebut dalam dinas sehari-hari, apakah sesuai dengan jabatan <i>definitive</i> ?	Penunjukan saya sesuai dengan <i>Korps Suplay</i> dan tugas sehari-hari saya sesuai dengan arahan Ka Akun dan jabatan saya sebagai Kasubsi Verifikasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada BPK RI. Penunjukan pengelolaan Simak BMN di Diskual masih merangkap maksudnya disini sebagai coordinator Simak BMN adalah Kabagum tugas sehari-hari selain itu pertanggungjawaban Simak BMN merupakan tugas lain yang dibebankannya. dan pelaksana hanya satu merangkap yang tugas pokoknya sebagai operator Saiba tugas lainnya juga mengerjakan tugas Simak BMN.

No.	Pertanyaan	Jawaban
3.	Bagaimana penyusunan Laporan Keuangan TNI Angkatan Laut saat ini?	Penyusunan Laporan Keuangan masih berpedoman dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Menteri/Lembaga. Proses penyusunan sampai dengan saat ini penyusunan Laporan Keuangan Unit Organisasi TNI Angkatan Laut dalam proses menuju baik namun belum optimal
4.	Apa saja hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?	masih ditemukan Akun Persediaan/Aset yang belum diregester, nilai TK/TM yang masih cukup tinggi perbedaan selisihnya, pencatatan Hibah/Barang/Uang yang belum tertib, Nilai Buku lebih besar dari Perolehan BMN.
5.	Apakah Laporan Keuangan dalam penyusunannya menggunakan sepenuhnya aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan?	Ya, walaupun masih ada tambahan program aplikasi kecil yang menghubungkan antara Aplikasi Saiba dan Simak BMN ke masing-masing unit akuntansi cukup membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan
6.	Bagaimana solusi menghadapi hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?	Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi internal antara Saiba dan Simak BMN untuk kesesuaian data. Koordinasi dengan satker BMN untuk penyelesaian TK/TM menginventarisir pencatatan hibah yang diterima dalam LK, menginventarisir hutang piutang rumah sakit yang sudah terbayar untuk dilaksanakan jurnal balik, memperbaiki saldo perolehan dan nilai buku minus
7.	Apakah dampak yang terjadi akibat adanya hambatan dalam penyusunan LK?	Hambatan dalam penyusunan LK akan berimplikasi terhadap kualitas produk LK Satker yang kurang baik, kualitas LK adalah indicator pengelolaan keuangan negara

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
IMPLENTASI THEORY OF CONSTRAINT DALAM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN  
KEUANGAN PADA DINAS KEUANGAN ANGKATAN LAUT**

<b>Nama</b>	:	<b>Wulan Furwanto HW., S.E., M.M.</b>
<b>Pangkat/NRP/NIP</b>	:	<b>Letkol Laut (S) NRP 15111/P</b>
<b>Jabatan</b>	:	<b>Kasi Akun Subdis APK Diskual</b>
<b>Tanggal Wawancara</b>	:	<b>23 Mei 2022</b>
<b>Waktu Wawancara</b>	:	<b>15.00 Wib</b>
<b>Lokasi Wawancara</b>	:	<b>Ruang Subdis APK Diskual</b>

**1. Aspek Organisasi**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Apakah petugas Saiba dan SIMAK BMN sudah ditetapkan dengan jelas sesuai dengan organisasi satuan, kapan penetapan tersebut dan bagaimana penunjukannya?	Sesuai peraturan menteri keuangan pembentukan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan barang. pembentukan dimulai dari tingkat Satker sampai tingkat kementerian. Tingkat satker kita kenal namanya Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang. Untuk tingkat wilayah Unit akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran dan Barang Wilayah tingkat wilayah. Lalu ada juga unit akuntansi pembantu pengguna eselon selanjutnya ada unit akuntansi pengguna barang di tingkat kementerian untuk di TNI Angkatan Laut pembentukan unit akuntansi Wilayah dijabat oleh Paban IV Slog Kasal yang membawahi seluruh Simak BMN TNI Angkatan Laut dibandingkan dengan anggaran yang mana disetiap wilayah ada pejabatnya memang tidak efektif saat dilaksanakan rekon tapi saat ini sedang dipikirkan bagaimana akan dibentuk perwilayah agar sejajar dengan pejabat anggaran. ditingkat eselon satu yaitu unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon satu yang dalam hal ini, ditunjuk sebagai unit akuntansi adalah Paban IV/BMN Slog Kasal. Unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan barang ditunjuk para kepala akuntansi atau ka akun dan satker-satker di lingkungan Mabesal juga memiliki organisasi Simak BMN.

No.	Pertanyaan	Jawaban
2.	Apakah ada persyaratan Pendidikan untuk para petugas operator Saiba dan operator Simak BMN	Operator Saiba di jajaran keuangan secara rutin diadakan kursus karena hampir setiap tahun ada sosialisasi dari Kemenkeu dan tidak hanya operator yang mendapatkan sosialisasi tapi dari patugas paling bawah hingga kalangan manajemen mendapatkan sosilisasi dari kemenkeu serta untuk kalangan PPSPM diwajibkan sebelum memanguku jabatan harus memiliki sertifikasinya sedang untuk Simak BMN kursus operator diadakan oleh Slog Kasal dalam hal ini Paban IV Slog Kasal yang bertanggungjawab dengan aplikasi Simak BMN di jajaran BMN TNI Angkatan Laut.
3.	Apakah penyusunan Laporan Keuangan U.O TNI Angkatan Laut sudah berjalan dengan baik?	Sudah, jika ada masalah dapat diselesaikan dengan menyelesaikan dalam aplikasi
4.	Apa hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?	Hambatan saat proses penyusunan laporan keuangan yang slalu terjadi setiap tahunnya yaitu terjadinya pagu minus ini disebabkan karena masih dalam pengerjaan, nilai TKTM yang belum diselesaikan sangat tinggi, nilai Aset yang belum deregister, Selisih nilai Saiba dengan Simak BMN, Jadwal buka tutup rekon yang terbatas juga tentang Hibah yang belum disahkan
5.	Bagaimanakah penyebab terjadinya hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?	Karena kurang cermat operator menginput data dalam aplikasi hal ini mengakibatkan selisih TK/TM tinggi, juga terdapat aplikasi yang salah dalam aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN dalam hal ini yaitu didalam aplikasi tidak dapat membuat account unit akuntansi yang baru dibentuk dan ada kode barang Simak BMN yang tidak dapat diinput dalam aplikasi Simak BMN
6.	Apakah dampak yang terjadi akibat adanya hambatan dalam Menyusun Laporan Keuangan?	Salah dalam penginputan dan kurangnya penguasaan terhadap penggunaan aplikasi Saiba dan Simak BMN serta aturan-aturan Hibah ini mengakibatkan Laporan Keuangan yang dibuat menjadi tidak valid Laporan Keuangan menjadi tidak berkualitas dan Opini yang diberikan oleh BPK akan turun

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
7.	Bagaimanakah solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?	Solusi untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan cara pelatihan, kursus dll, serta meningkatkan kemampuan penguasaan terhadap aplikasi Saiba dan Simak BMN dengan cara pelatihan terus menerus tidak kalah pentingnya Sosialisasi aturan yang berlaku
8.	Bagaimana proses penyusunan Laporan Keuangan yang ideal?	a. Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam (PMK 222) b. Kesesuaian antara uang dan barang

  
**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**JAKARTA**

**AFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
IMPLENTASI THEORY OF CONSTRAINT DALAM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN  
KEUANGAN PADA DINAS KEUANGAN ANGKATAN LAUT**

<b>Nama</b>	:	<b>AGUS SANTOSO, S.E.</b>
<b>Pangkat/NRP/NIP</b>	:	<b>PEMBINA IV/a 196609111987121001</b>
<b>Jabatan</b>	:	<b>KASUBSI MALUR SUBDISGARBIA DISKUAL</b>
<b>Tanggal Wawancara</b>	:	<b>Februari - Juli 2022</b>
<b>Waktu Wawancara</b>	:	<b>15.00 Wib</b>
<b>Lokasi Wawancara</b>	:	<b>Ruang Subdis APK Diskual</b>

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Kapan penetapan pembentukan satuan organisasi keuangan dan SIMAK BMN berdampingan dan bagaimana penunjukannya?	Sesuai peraturan menteri keuangan wajib membentuk unit akuntansi anggaran dan barang hal ini terdapat pada Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut dan Validasi Organisasi Badan Keuangan (Baku) di Lingkungan TNI Angkatan Laut, nama Badan Keuangan (Baku I) dari tingkat I sampai dengan tingkat IV (Baku IV) sejak tahun 2016 di bawah jajaran Kemhan RI menjadi Unit Akuntansi pengguna anggaran atau UAPA dan barang atau UAPB untuk pejabatnya ditunjuk Menteri Pertahanan, untuk unit akuntansi pembantu pengguna anggaran atau UAPPA tingkat eselon 1 ditunjuk Kadiskual sebagai penanggungjawabnya dan barang atau UAPPB untuk pejabatnya Aslog Kasal, unit akun pembantu pengguna anggaran wilayah atau UAPPAW ditunjuk Kepala Wilayah dan barang atau UAPPBW tidak ada tingkat wilayah sehingga ditunjuk Paban IV Slogal merangkap mengelola SIMAK BMN, sedangkan tingkat terbawah unit akuntansi kuasa pengguna anggaran UAKPA ditunjuk Kepala Akuntansi (Ka Akun) begitupun barang sebagai penanggungjawabnya Ka Akuntansi (Ka Akun).
2.	Apa hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?	Dengan adanya perubahan aplikasi yang diluncurkan pada saat waktu sudah hampir mendekati batas waktu penyampaian pembuatan laporan keuangan, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan data yang belum terdeteksi dari sebelumnya.

No.	Pertanyaan	Jawaban
3.	Bagaimanakah penyebab terjadinya hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?	<p>Karena perubahan system</p> <p>Karena adanya tktn yang masih cukup besar selisihnya</p> <p>Karena batas waktu penyusunan yg dengan data waktunya terlalu pendek</p> <p>Karena adanya data pendukung yang belum terkumpul</p>
4.	Apakah dampak yang terjadi akibat adanya hambatan dalam Menyusun Laporan Keuangan?	Dampak yang terjadi dengan adanya beberapa hambatan dalam penyusunan LK adalah terjadi beberapa koreksi yang diakibatkan dari hambatan2 tsb, namun akhirnya dapat terselesaikan dengan adanya beberapa koreksi.
5.	Mengapa hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut dapat terjadi?	Hambatan tersebut terjadi karena perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang disesuaikan dengan adanya perubahan2 kebijakan dan koreksi dari team Auditor.
6.	Bagaimanakah solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?	Solusi dalam penyelesaian hambatan yang terkait dengan adanya perubahan kebijakan aplikasi maka kita lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan pengecekan data yang memerlukan waktu lebih ekstra dengan cara bekerja over time.
7.	Bagaimana proses penyusunan Laporan Keuangan yang ideal?	Sebenarnya dalam penyusunan LK tidak ada atau tidak bisa ideal, karena hal tersebut banyak keterkaitan data yang harus diselesaikan dan harus di kroscek dengan sumber datanya sampai data tsb cocok dan benar, sehingga kalua ada pertanyaan penyusunan LK yang ideal jawabanya tidak ada.
8.	Bagaimana dengan aplikasi Saiba dan Simak BMN	Aplikasi Saiba dan Simak BMN masih belum optimal dalam pengelolaan perlu banyak perbaikan dan sinkronisasi baik itu mengenai ada satker Akuntansi yang belum diakui dalam aplikasi juga ada akun yang belum bisa kita inputkan kedalam aplikasi hal ini yang menjadikan kesulitan yang berdampak langsung dalam penyusunan lanporan keuangan dikarenakan sinfonia belum optimal dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan.

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
9.	Apakah semua aturan/regulasi tentang Saiba dan Simak BMN sudah diketahui oleh para petugas?	Untuk petugas jajaran keuangan secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai aturan/regulasi dan pelatihan mengenai sekitar keuangan diharapkan para petugas keuangan dapat mengetahui dan mengambil langkah – langkah sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan untuk petugas Simak BMN yang saya tahu ada pendidikan yang diadakan Kemhan untuk perwira menengah (pamen)


  
**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**J A K A R T A**

**AFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
IMPLENTASI THEORY OF CONSTRAINT DALAM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN  
KEUANGAN PADA DINAS KEUANGAN ANGKATAN LAUT**

<b>Nama</b>	:	<b>JOKO NUR ANDI ATMOKO, S.T.</b>
<b>Pangkat/NRP/NIP</b>	:	<b>KAPTEN LAUT (S) NRP 19609/P</b>
<b>Jabatan</b>	:	<b>BP DISKUAL</b>
<b>Tanggal Wawancara</b>	:	<b>24 Maret 2022</b>
<b>Waktu Wawancara</b>	:	<b>16.00 Wib</b>
<b>Lokasi Wawancara</b>	:	<b>Ruang BP Diskual</b>

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	Apakah penyusunan Laporan Keuangan U.O TNI Angkatan Laut sudah berjalan dengan baik?	Pada dasarnya penyusun LK untuk tingkat UO TNI AL sudah berjalan dengan baik walaupun pada proses penyusunan sering ditemukan permasalahan seperti saldo tidak normal, selisih TK/TM, Pagu Minus, Aset belum deregister, selisih SAIBA dan SIMAK BMN, Serta Hutang Piutang.
2.	Apa hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?	Transaksi TK/TM yang masih selisih Terdapat data asal yang berubah akibat menu kertas kerja konfirmasi (K-3)
3.	Bagaimanakah penyebab terjadinya hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi hambatan tersebut diakibatkan karena pada saat TK/TM tidak terjalin komunikasi yang baik antar satker yang melaksanakan TK dan satker yang melaksanakan TM</li> <li>- Terjadi karena adanya menu kertas kerja konfirmasi (K-3) sehingga data SIMAK dalam E-rekon</li> </ul>
4.	Apakah dampak yang terjadi akibat adanya hambatan dalam Menyusun Laporan Keuangan?	<p>Update Sistem Aplikasi SAIBA dan SIMAK yang waktunya mendekati waktu pembuatan LK Berdampak pada Keterlambatan data yang disajikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi karena adanya menu kertas kerja konfirmasi (K-3) data pada e-recon berdampak pada perbedaan data di aplikasi offline dan online</li> </ul>

No.	Pertanyaan	Jawaban
5.	Mengapa hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut dapat terjadi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Terjadi karena kurangnya koordinasisatker yg melaksanakan TK dan satker TM</li> <li>-TK TM yg dilaksanakan tidak menggunakan ADK yg diinput dari satker TK (satker TM masih menginput sendiri)</li> </ul>
6.	Bagaimanakah solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diadakan Rekonsiliasi antara SIMAK dan SAIBA seyogyanya scra periodic</li> <li>- Diadakan update system aplikasi yang lebih baik shg kejadian pada saat mendekati waktu pembuatan LK data yg disajikan oleh e-recon tidak terdapat hambatan</li> </ul>
7.	Bagaimana proses penyusunan Laporan Keuangan yang ideal?	<p>Diadakan rekonsiliasi scr berkala antara Saiba dan Simak BMN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan data dukung dilaksanakan pada saat ceklar periode laporan</li> <li>- Waktu penyampaian pelaporan sesuai dengan ketentuan Pmk 222</li> <li>- Dalam lk disajikan LRA , LO, Neraca, dan LPE serta CALK (sesuai pmk 222)</li> </ul>
8.	Bagaimana penyusunan Laporan Keuangan unit organisasi Angkatan Laut dari tahun 2017 sampai dengan 2020?	<p>Bila dilihat dari opini BPK RI Laporan Keuangan Kemhan tahun 2017 masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun tersebut merupakan pertama kalinya laporan anggaran digabungkan dengan laporan barang yang dinilai secara uang walaupun laporan barang masih berlangsung dilaporkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) secara rutin. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 opini BPK RI sudah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) walaupun masih banyak kekurangan dan kesalahan yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan khususnya laporan keuangan unit organisasi Angkatan Laut.</p>



## II. NERACA

UNIT ORGANISASI TNI ANGKATAN  
LAUTNERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	500	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	41.771.394	27.884.662
Kas lainnya dan Setara Kas	C.3	29.361.653.702	5.784.111.806
Kas Pada Badan Layanan Umum	C.4	78.225.949.899	29.557.650.958
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.5	2.847.950.000	1.086.250.000
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.6	25.295.715.736	26.203.051.459
Piutang Bukan Pajak	C.7	15.868.222.239	108.771.930.732
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	(79.341.108)	(543.859.652)
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	C.9	<b>15.788.881.131</b>	<b>108.228.071.080</b>
Bagian Lancar TP / TGR	C.10	429.763.112	429.763.112
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	C.11	(429.763.112)	(429.763.112)
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.12	57.901.599.205	138.787.595.035
Penyisihan Piutang tak tertagih - piutang dari kegiatan operasional BLU	C.13	(289.507.997)	(693.937.976)
<b>PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)</b>	C.14	<b>57.612.091.208</b>	<b>138.093.657.059</b>
Persediaan	C.15	16.610.644.602.359	16.600.671.772.451
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>16.819.818.615.929</b>	<b>16.909.652.449.475</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.16	322.920.741.370.967	322.152.878.293.027
Peralatan dan Mesin	C.17	88.680.225.898.877	83.262.154.719.217
Gedung dan Bangunan	C.18	13.708.882.841.002	11.836.574.052.651
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.19	6.135.301.011.694	5.411.150.742.854
Aset Tetap Lainnya	C.20	1.508.631.634.673	1.121.676.284.488
Kontruksi dalam pengerjaan	C.21	1.775.971.758.139	875.328.931.163
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(57.257.328.116.724)	(48.903.104.559.522)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>377.472.426.398.628</b>	<b>375.756.658.463.878</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.23	8.838.604.683.000	8.838.604.683.000
Aset Tak Berwujud	C.24	341.363.749.637	254.175.475.105
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.25	28.691.974.147	25.618.435.076
Aset Lain-lain	C.26	782.524.023.775	763.418.057.439
Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya	C.27	(784.894.950.282)	(760.705.717.951)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>9.206.289.480.277</b>	<b>9.121.110.932.669</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>403.498.534.494.834</b>	<b>401.787.421.846.022</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.28	1.676.716.314.891	2.178.240.909.428
Pendapatan Diterima Dimuka	C.29	11.696.159.466	6.494.002.256
Uang Muka dari KPPN	C.30	500	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>1.688.412.474.857</b>	<b>2.184.734.911.684</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1.688.412.474.857</b>	<b>2.184.734.911.684</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.31	401.810.122.019.977	399.602.686.934.338
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>401.810.122.019.977</b>	<b>399.602.686.934.338</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>403.498.534.494.834</b>	<b>401.787.421.846.022</b>



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260  
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996  
Email : politeknik@stialan.ac.id, website : www.stialan.ac.id

Nomor : 1078/STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 5 Januari 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Proposal Tesis  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut  
u.p. Kasubdis Akuntansi Pelaporan Keuangan Angkatan Laut  
Mabesal Cilangkap Gedung B4 Jakarta Timur

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Arie Dwidesta  
NPM : 1963002006  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi bapak/ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya bapak/ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.



an Direktur  
Wakil Direktur I Bidang Akademik, MA

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

- Tembusan:
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
  2. Mahasiswa Ybs;
  3. Peringgal.

MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT  
DINAS KEUANGAN

SURAT KETERANGAN  
Nomor: Sket/ 31 /XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Rudi Purwanto, S.E., M.Hum., M.Sc., M.Tr.Opsla  
Pangkat : Letkol Laut (S) NRP 16719/P  
Jabatan : Kabagum Diskual

Dengan ini menerangkan Bahwa:

Nama : Arie Dwidesta  
Pangkat/NIP : Penata Tk.I III/d 197012052001122001  
Jabatan : Kaur Otorisasi Subdisgarbia Diskual

Telah selesai melaksanakan penelitian di Subdis APK Diskual dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul “ Analisis Penyusunan Laporan Keuangan TNI Angkatan Laut Pada Subdis Akuntansi Pelaporan Keuangan Dinas Keuangan Angkatan Laut” yang dilakukan pada tanggal 10 Januari s.d. 26 Agustus 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta 8 Desember 2022  
a.n. Kepala Diskual  
Sekdiskual  
u.b.

Kabagum  
  
Rudi Purwanto, S.E., M.Hum., M.Sc., M.Tr.Opsla  
Letkol Laut (S) NRP 16719/P